

**PERKEMBANGAN WILAYAH CIREBON TIMUR MASA KOLONIAL
HINDIA BELANDA**

***Development of the East Cirebon Region During the Dutch
Indies Colonial Period***

Mustaqim Asteja

Komunitas Pusaka Kendi Pertula

Jl. Tambas 2 No. 49, Desa Pasindangan, Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Indonesia

Pos-el: kendipertula@yahoo.com

Naskah diterima: 10 Oktober 2024 - Revisi terakhir: 1 Desember 2024

Disetujui terbit: 5 Desember 2024 - Terbit: 23 Desember 2024

Abstract

Eastern Cirebon is a strategic border region that underwent fundamental transformation under the administration of the Dutch East Indies Colonial Government (1681–1942), yet its development has not been extensively examined in a comprehensive manner. This research analyzes the development of the Eastern Cirebon region, focusing on the political-administrative transformation following the early 20th-century decentralization and the role of the sugar industry in shaping the colonial economy. Employing a historical research method with a historical archaeology approach, data were collected from colonial archives (Regerings-Almanak, staatsblad, maps) and local manuscripts, then verified, analyzed thematically, and structured into historical narrative. The findings indicate that Eastern Cirebon underwent intensive bureaucratization, evolving from a sultanate territory into a district within the regency structure. The 1903 decentralization policy triggered repeated territorial reorganization. The sugar industry emerged as the primary economic driver, creating patterns of dependency and exploitation of local labor. The discussion reveals complex interactions between colonial policy, extractive economics, and local social structures. The development of Eastern Cirebon resulted from dynamic interactions among the continuously evolving colonial administrative system, the extractive sugar plantation economy, and the socio-cultural context of the local community. This transformation shaped the region's bureaucratic and economic landscape, leaving a structural legacy that persisted beyond independence.

Keywords: *Eastern Cirebon, Colonial Period, Colonial Administration, Sugar Industry, Local History*

Abstrak

Cirebon Timur merupakan wilayah perbatasan strategis yang mengalami transformasi mendasar di bawah pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1681–1942), namun perkembangannya belum banyak dikaji secara komprehensif. Penelitian ini menganalisis perkembangan wilayah Cirebon Timur dengan fokus pada transformasi politik-administratif pasca desentralisasi awal abad XX dan peran industri gula dalam pembentukan ekonomi kolonial. Menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan arkeologi sejarah. Data dikumpulkan dari arsip kolonial (Regerings-Almanak, staatsblad, peta) dan naskah lokal, kemudian diverifikasi, dianalisis secara tematik, dan disusun menjadi narasi sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cirebon Timur mengalami birokratisasi intensif, berevolusi dari wilayah kesultanan menjadi distrik dalam struktur kabupaten. Kebijakan desentralisasi tahun 1903 memicu reorganisasi wilayah

berulang. Industri gula menjadi penggerak ekonomi utama, menciptakan pola ketergantungan dan eksploitasi tenaga kerja lokal. Pembahasan mengungkap interaksi kompleks antara kebijakan kolonial, ekonomi ekstraktif, dan struktur sosial setempat. Perkembangan Cirebon Timur merupakan hasil interaksi dinamis antara sistem administrasi kolonial yang terus berubah, ekonomi perkebunan gula yang ekstraktif, dan konteks sosio-kultural masyarakat. Transformasi ini membentuk lanskap birokrasi dan ekonomi wilayah serta meninggalkan warisan struktural yang bertahan pasca kemerdekaan.

Kata kunci: Cirebon Timur, Masa Kolonial, Administrasi Kolonial, Industri Gula, Sejarah Lokal

PENDAHULUAN

Cirebon dalam kajian arkeologi sejarah diketahui sebagai daerah pusat penyebaran Islam pertama untuk wilayah *Tatar Sunda* atau Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya. Mengalami masa kejayaan sebagai *Nagari Islam* pada masa pemerintahan *Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati* (1479-1568), seorang *Wali* di Pulau Jawa yang menegakkan dan menata agama Islam sebagai *Pandhitaratu Sinarat Sunda* bertahta di *Keraton Pakungwati* Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi, di makamkan di *Gunung Sembung Astana Agung Gunung Jati*, selanjutnya kedudukan dan kekuasaannya di Cirebon dilanjutkan oleh anak cucu keturunannya sebagai *Panembahan* dan *Sultan-Sultan Cirebon*.

Keutuhan Kerajaan Islam Pakungwati Cirebon hanya sampai masa Panembahan Girilaya, setelah wafatnya pada 1662 kerajaan ini dibagi sebagai warisan bagi kedua putranya Martawijaya dan Kartawijaya untuk memerintah bersama, dan kepada putra ketiga Wangsakerta diakui haknya atas 1000 cacah sebagai apanage (pelungguh, tunjangan tanah berikut penduduknya 1000 kepala keluarga yang dapat dipungut hasilnya). Sejak saat itu raja yang tertua disebut Raja Syamsuddin atau Raja Sepuh, yang kedua Raja Kamaruddin (Badrudin) atau Raja Anom. Keduanya semenjak tahun 1677 memperoleh gelar Sultan. Kasultanan Kasepuhan dan Kasultanan Kanoman yang terbentuk tahun 1677-1678 masing-masing memiliki wilayah kekuasaan sendiri, Wilayah kekuasaannya pada waktu itu luasnya sekira sepanjang daerah pesisir Indramayu, Cirebon, dan Gebang.

Datangnya pengaruh *VOC Kongsy Dagang* bangsa *Belanda* di Kasultanan Cirebon tahun 1681 menandai *Dukhabarayuga* atau *Zaman Kesengsaraan*, lima tahun berikutnya pada 1686 berdirilah benteng di Cirebon menandai tonggak *Masa Kolonial*, Cirebon menjadi daerah protektorat VOC. Selanjutnya pada akhir tahun 1799 VOC bangkrut dan dibubarkan akibat perilaku korupsi pegawainya yang merajalela. Pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1808 muncul kekuasaan baru di Cirebon yaitu Kasultanan Kacirebonan. Selanjutnya Wilayah Kasultanan Cirebon menjadi Ibukota dan wilayah *Residentie Cheribon* atau *Karesidenan Cirebon* (1816), *Regentschap Cheribon* atau *Kabupaten Cirebon* (1819), dan wilayah *Gemeente Cheribon* atau *Kotapraja Cirebon* sejak 1 April 1906.

Tulisan ini menganalisis perkembangan wilayah Cirebon Timur dengan fokus pada transformasi politik-administratif pasca desentralisasi awal abad XX dan peran industri gula dalam pembentukan ekonomi kolonial. Untuk menjawab permasalahan yang

diajukan, digunakan metode penelitian historis dengan pendekatan arkeologi sejarah. Data dikumpulkan dari arsip kolonial (*Regerings-Almanak*, *staatsblad*, peta) dan naskah lokal, kemudian diverifikasi, dianalisis secara tematik, dan disusun menjadi narasi sejarah.

METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Cirebon Sampai Akhir Abad XIX.

Secara Historis Geografis *Caruban Nagari* sebutan wilayah Cirebon tempo dahulu, pada masa awal terbentuknya mempunyai letak yang sangat strategis di perbatasan antara dua kutub kebudayaan di Pulau Jawa, Budaya Sunda (Kerajaan Pajajaran) di wilayah barat, dan Budaya Jawa (Kerajaan Majapahit) di wilayah timur. Budaya Sunda dan Jawa merekat membentuk multibudaya yang khas yaitu Budaya Cirebon. Budaya Cirebon juga merupakan perpaduan antara budaya Maritim (Kelautan) dengan budaya Agraris (Pertanian). Budaya Maritim Cirebon meliputi wilayah pesisir pantai yang dinamakan Caruban Larang yang masyarakatnya sebagian besar berbahasa Jawa, sedangkan Budaya Agraris meliputi wilayah sekitar lereng pegunungan Ciremai di selatan dan pegunungan Kromong di barat yang dinamakan Caruban Girang, masyarakatnya berbahasa Sunda. Gunung Ciremai dan Gunung Jati menjadi penanda Caruban Nagari dari arah lautan. Kedua Wilayah Cirebon tersebut dihubungkan oleh sebuah sungai sebagai sarana transportasi yang hulunya disebut sungai Suba di Caruban Girang dan muaranya disebut sungai Krian di Caruban Larang (Asteja 2014, 1-2).

Selanjutnya menurut Pangeran Aria Carbon, Caruban Nagari adalah sebuah negeri besar yang masyarakatnya hidup makmur di bawah pemerintahan Susuhunan Jati Purba Wisesa atau Sunan Gunung Jati, salah seorang “Wali” di Pulau Jawa yang menegakkan dan menata agama Islam di Tanah Sunda. Susuhunan Jati Purba Wisesa bertahta di Keraton Pakongwati (Pakungwati) bersama uwaninya, Pangeran Cakrabuwana bergelar Sri Mangana sebagai Ki Kuwu Caruban ke dua dan menjadi manggala Caruban Nagari. Pada awalnya nama Caruban adalah Sarumban yang artinya Campuran lalu diucapkan menjadi Caruban akhirnya Carbon atau kini Cirebon (Danasasmita 1983). Wali Songo menamakan “Puser Bumi”, negeri yang ada ditengah bumi Pulau Jawa. Penduduk setempat menamakan “Nagari Gede” yang diucapkan “Garage” kemudian menjadi “Grage” (Atja 1986, 154) (Dasuki 1978, 1-2) (Sulendraningrat 1972, 9).

Sebagai Kota Bandar Kuna pesisir pantai utara Jawa, letak Cirebon masa itu telah dikenal dan tercatat dalam berbagai manuskrip. Manuskrip Cina *Shun-Feng Hsiang – Sung* sebuah buku pedoman pelayaran yang disusun +th 1430 M yang sekarang tersimpan di Bodleian Library (Oxford), menerangkan intruksi jalur pelayaran dari *Shun-t’a* (Sunda Pajajaran) kearah timur sepanjang pantai Utara menuju *Che-Li-Wen* (Cirebon) (Tjandrasasmita 2009). Hal tersebut dikuatkan pula oleh manuskrip Portugis *Suma*

Oriental (1513-1515) karya *Tome Pires* menerangkan tentang Pulau Jawa yang wilayahnya meliputi Sunda dan Jawa dipisahkan oleh sebuah sungai yang bernama *Chemano* (Cimanuk). Di wilayah Jawa terdapat beberapa pelabuhan salah satunya *Cheroboam* (Cirebon). *Charabaon* (Cirebon) telah dipetakan dalam peta Asia yang dibuat oleh *Mercator* dan dilengkapi oleh *Hondius* (1606) di Amsterdam. *Da Asia, Decada IV* karya *Joao De Barros* (\pm 1496 – 1570) yang diedit oleh *Joao Baptista Lavanha* tahun 1615 di Madrid, terdapat peta pulau Jawa yang menggambarkan pelabuhan-pelabuhan di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa diantaranya *Charabom* (Cirebon) disebelah Timur *River Chiamo* (sungai Cimanuk) (Heukeun 1999, 30-42, 73, 96, 106-108).

Munculnya Cirebon dalam dinamika sejarah Nusantara (Indonesia) seiring dengan awal proses Islamisasi di pulau Jawa. Sejarahwan dan arsiparis bangsa Belanda, Dr. E.C. Godee Molsbergen, mencatat bahwa Cirebon pada zaman Hindu tidak terkenal, pada saat itu terdapat peninggalan prasasti di Kawali (Ciamis). Di Talaga (Majalengka) ditemukan koleksi brons (patung perunggu), dan sebuah danau keramat yang dipergunakan untuk upacara keagamaan masyarakat pribumi yang tidak boleh dikunjungi oleh bangsa Eropa. Suatu peristiwa penting dalam keagamaan di Cirebon adalah kedatangan seorang Arab penyebar agama Islam, terkenal dengan nama Syekh Israel Ibn Maulana, Falatehan, atau Susuhunan Gunung Jati. Pada saat kedatangannya, masyarakat menghormati beliau dengan mempersembahkan sebuah piring yang berisi sari godokan udang, yang dinamakan “Peter”. Suatu daerah yang bernama Pakongwati (Pakungwati), setelah itu dinamakan Tjai-rebon atau Tjirebon. Orang-orang Portugis menulisnya Charabon. Di dalam dokumen VOC ditulis Tsjeribon, Chirrebon, Sirrebon (Molsbergen 1931).

Setelah VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799, dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memanfaatkan para bupati untuk keperluan politik militer. Oleh Daendels gelar para Bupati ditentukan korelasinya dengan kepangkatan militer. Bupati bergelar Tumenggung mendapat pangkat Mayor, Bupati bergelar Aria disamakan dengan Letnan Kolonel, dan Bupati bergelar Adipati atau Pangeran diberi pangkat Kolonel. Tanggal 2 Februari 1809, Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Batavia (1808-1811) menetapkan Pengaturan dalam pengelolaan wilayah Cirebon, negeri Cirebon dibagi menjadi dua Prefectuur: Prefectuur bagian Utara meliputi daerah Kasultanan Cirebon dan Pangeran Gebang, diperintah oleh tiga orang Sultan yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Kacirebonan. Masing-masing menguasai 4 buah Distrik. Prefectuur bagian Selatan disebut Tanah Priangan-Cirebon meliputi daerah Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan kabupaten Galuh. Wilayah Prefectuur dipimpin oleh seorang Prefect yang membawahi beberapa orang Bupati, istilah Prefect ini kemudian diganti menjadi Landdrost akhirnya diganti lagi menjadi Residen pada jaman kekuasaan Inggris.

Pada Tanggal 13 Maret 1809 Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) menetapkan bahwa wilayah Kesultanan Cirebon dibagi atas 3 daerah, masing-masing dikepalai oleh seorang Sultan. Ketiga daerah dimaksud adalah: *Pertama*, Daerah

Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh Sultan Sepuh VII Pangeran Tajul Arifin Johanuddin, selama 25 tahun; *Kedua*, Daerah Majalengka oleh Sultan Anom VI Pangeran Raja Mohamad Komarudin I, selama 27 tahun; *Ketiga*, Daerah Indramayu dikepalai oleh Sultan Kacirebonan, selama 6 tahun. Saat itu wilayah Kesultanan Cirebon terdiri atas 12 Distrik yaitu: Losari, Gebang, Panjalu, Talaga, Kuningan, Cikaso, Matanghaji, Rajagaluh, Sindangkasih, Bengawan Wetan, Bengawan Kulon, dan Paparean. Masing-masing Distrik dikepalai oleh seorang pejabat bergelar *Tumengung*.

Pada saat Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) memerintah Pulau Jawa, kedaulatan kekuasaan politik Sultan-sultan Cirebon diperlemah oleh Lieutenant Gubernur Jendral Inggris Thomash Stanford Raffles dengan mengeluarkan "Proclamation" tanggal 19 Juli 1813, sehari kemudian yaitu tanggal 20 Juli 1813 Raffles secara sepihak mengeluarkan "Memorandum" bahwa para Sultan di pensiunkan dan diberi tunjangan pensiun dan penghasilan dari beberapa luas tanah dan dipertegas lagi dengan surat tertanggal 21 April 1815. Dengan demikian, Para Sultan Cirebon secara politik berkedudukan sebagai pegawai setingkat Bupati atau Regent, meskipun demikian dihadapan rakyat mereka masih diperkenankan memakai tanda-tanda kebesaran dan cara-cara penghormatan yang telah menjadi tradisi selama ini.

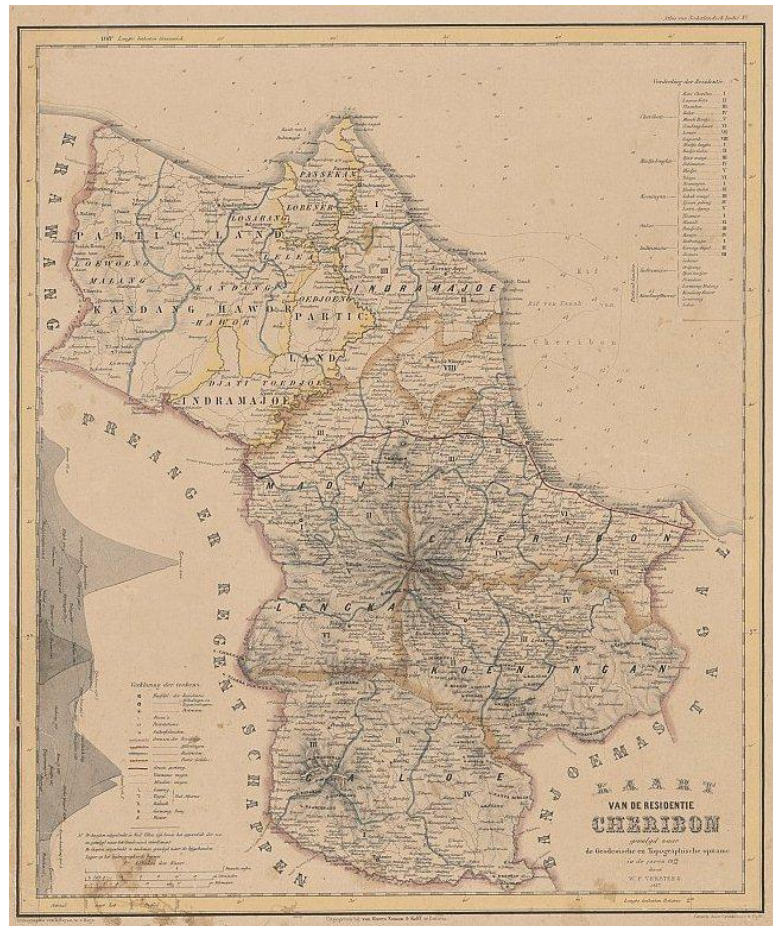
Pada tahun 1815-1816 untuk kepentingan pelaksanaan pengelolaan wilayah dan pembayaran pajak Pemerintah Inggris mendata secara detail wilayah Kasultanan Cirebon dan membaginya menjadi 13 wilayah Division (wilayah setingkat Distrik) sebagai berikut : 1. Division of Rajah Galloo (Rajagaluh) terbagi lagi dalam 31 wilayah Sub Division (setingkat Desa); 2. Division of Chiamis (Ciamis) tebagi dalam 27 Desa; 3. Division of Punjaloo (Panjalu), 7 Desa; 4. Division of Talaga, 53 Desa; 5. Division of Sindang Kafsie (Sindangkasih), 17 Desa; 6. Division of Belandong, 14 Desa; 7. Division of Chikafso (Cikaso), 67 Desa; 8. Division of Kooningan (Kuningan), 30 Desa; 9. Division of Lingajattie (Linggarjati), 49 Desa; 10. Division of Cheribon (Cirebon), 152 Desa; 11. Division of Bangawan (kini sebagian wilayahnya menjadi Kabupaten Indramayu), 122 Desa; 12. Division of Gubbang (Gegang), 45 Desa; serta wilayah 13. Division of Losarie (Losari) terdiri dari 27 Desa.

Dalam Staatsblad tahun 1816 No. 28 tanggal 10 Desember 1816, dibentuk daerah Residenten dan Assisten Residenten di Jawa dan Madura dan diluar Jawa. Residenten dipimpin oleh seorang Resident yang dibantu oleh Assisten Resident.

Selanjutnya diberlakukan Staatsblasd tahun 1819 No. 9 bahwa dengan Besluit Komisaris Jenderal tanggal 5 Januari 1819 No. 23 menetapkan batas-batas wilayah Kabupaten-Kabupaten di Keresidenan Cirebon baik batas darat, laut, maupun sungai. Pada tahun 1820 Keresidenan Cirebon terdiri atas 5 Kabupaten yaitu: Cirebon, Kuningan, Maja, Bengawan Wetan (Indramayu), dan Galuh. Lima tahun kemudian Kabupaten Bengawan Wetan dihapuskan.

Pada tahun 1857 wilayah Karesidenan Cirebon terbagi dalam lima wilayah Kabupaten yaitu: (1) Kabupaten Cirebon, terbagi menjadi delapan distrik meliputi Kota

Cirebon, Luar Kota, Plumbon, Beber, Mandirancan, Sindanglaut, Losari, dan Gegesik; (2) Kabupaten Majalengka, terbagi dalam enam distrik, meliputi Majalengka, Rajagaluh, Jatiwangi, Palimanan, Maja, dan Talaga; (3) Kabupaten Kuningan, terbagi dalam lima distrik, yaitu Kuningan, Kadugedeh, Lebakwangi, Ciawigebang, dan Luragung; (4) Kabupaten Galoe (sekarang menjadi Kabupaten Ciamis), terbagi dalam empat distrik, meliputi Ciamis, Kawali, Panjalu, dan Distrik Ranca; (5) Kabupaten Indramayu, terbagi dalam tiga distrik, yaitu Indramayu, Karangampel, dan Sleman (Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1857).



Gambar 1. Administrasi Karesidenan Cirebon tahun 1854 (sumber: Kaart Van De Residentie Cheribon (gevolgd naar de Geodesische en Topographische opname in de jaren 1854/56, door W.F. VERSTEEG 1857). Uitgegeven bij van Haren Noman & Kolff te Batavia).

Wilayah Karesidenan Cirebon (lihat gambar) termasuk juga tanah-tanah Partikular (swasta) di sebelah barat sungai Cimanuk yang terbagi dalam Tanah Partikular Indramayu, dan Tanah Partikular Kandanghaur, Tanah Partikular Indramayu meliputi Distrik Lobener, Ujung, Jatitujuh, serta Distrik Pasekan. Tanah Partikular Kandanghaur terdiri dari distrik-distrik: Luwung Malang, Kandanghaur, Losarang, serta Distrik Lelea (Kaart Van De Residentie Cheribon (gevolgd naar de Geodesische en Topographische opname in de jaren 1854/56, door W.F. VERSTEEG 1857). n.d.).

Perkembangan Wilayah Cirebon Timur Sampai Tahun 1942.

Pada perkembangan selanjutnya tahun 1883-1884 wilayah Karesidenan Cirebon terbagi dalam beberapa wilayah administratif, terdiri dari 33 wilayah Distrik dan 1360 wilayah Desa, yaitu. (1) 5 daerah *Afdeelingen*, terdiri dari Cheribon (Cirebon), Indramajoe (Indramayu), Madjalengka (Majalengka), Galoeh (Galuh-Ciamis), dan Koeningan (Kuningan); (2) 10 daerah *Controle Afdeelingen*, meliputi Cheribon (Cirebon), Ploembon (Plumbon), Sindanglaoet (Sindanglaut), Indramajoe (Indramayu), Radjagaloeh (Rajagaluh), Madja (Maja - Majalengka), Galoeh (Galuh), Kwali (Kawali), Koeningan (Kuningan), dan Loerahgoeng (Lurahgung); (3) 5 Daerah *Regentschappen* atau *Kabupaten* – *Kabupaten* dengan nomor urut daerah Distriknya sebagai berikut (Regerings-Almanak Voor Nederlandsch-Indie 1884, 77):

- 1) Kabupaten Cirebon membawahi 8 Distrik : Ploemboen (62), Mandirantjan (48), Beber (60), Gegesiklor (38), Palimanang (64), Kota Cheribon (70), Sindanglaoet (56), serta Losari (44).
- 2) Wilayah Indramajoe (Indramayu) terbagi dalam 11 Distrik, tiga (3) Distrik wilayah Kabupaten Indramayu : Karangampel (31), Indramajoe (30), dan Sleman (22); serta delapan (8) Distrik di Tanah Partikelir wilayah Kandanghaoer (Kandanghaur) dan *Indramajoe West* (Indramayu Barat) sebagai berikut : Lelea (13), Losarang (25), Kandanghaoer (14), Leuwengmalang (20), Pasekan (23), Lobener (23), Oedjoeng (21), serta Djatitoedjoeh.
- 3) Kabupaten Majalengka wilayahnya membawahi lima (5) Distrik : Madjalengka (30), Djatiwangi (34), Radjagaloeh (48), Madja (40), dan Talaga (72).
- 4) Kabupaten Galoeh (Ciamis) wilayahnya membawahi empat (4) Distrik : Tjiamis (86), Panjaloe (58), Kwali (40), dan Distrik Rantja (40).
- 5) Kabupaten Kuningan wilayahnya membawahi lima (5) Distrik : Koeningan (67), Kadoegedeh (52), Lebakwangi (26), Loerahgoeng (52), dan Tjiawigebang (30).

Wilayah *Regentschap* Cheribon atau Kabupaten Cirebon meliputi delapan (8) wilayah Distrik yaitu: Cirebon, Sindanglaut, Losari, Plumbon, Beber, Mandirancan, Gegesik Lor, serta Distrik Palimanan. Distrik Sindanglaut (Wedana Lemahabang) membawahi Asisten Wedana Kanci dan karangwareng, sedangkan Distrik Losari (Wedana Ciledug) membawahi Asisten Wedana Losari Lor, Gebang Hilir, serta Waled Pacinan, wilayah ini berada di sebelah Timur wilayah *Regentschap* Cheribon, di perbatasan wilayah antara Karesidenan Cirebon dan Karesidenan Tegal – Pekalongan, sekaligus juga perbatasan wilayah Timur antara Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Tengah, sehingga wilayah Distrik Sindanglaut dan Distrik Losari hingga kini populer disebut Wilayah Cirebon Timur (WCT), meskipun secara administratif pemerintahan bagian dari wilayah Kabupaten Cirebon .

Distrik Sindanglaut dan Distrik Losari mengalami berbagai perkembangan dan reorganisasi wilayah administratif. Tahun 1884-1894 wilayah Distrik Sindanglaut (Wedana Lemahabang) yang awalnya membawahi Asisten Wedana Kanci dan Karangwareng, menjadi Asisten Wedana Pengarengan, dan Asisten Wedana Karangwareng. Adapun Distrik Losari (Wedana Ciledug) wilayahnya tetap meliputi Asisten Wedana Waled Pacinan, Gebang Hilir, serta Asisten Wedana Losari Lor. Tahun 1894 -1900 telah dapat dihitung luas wilayah Distrik Sindanglaut Nomor 57, seluas 16.447,44 hektar terdiri dari Asisten Wedana Lemahabang, Pengarengan, dan Asisten Wedana Karangwareng. Adapun Distrik Losari Nomor 53, luasnya 20.771,53 hektar terdiri dari Asisten Wedana Ciledug, Waled Pacinan, Gebang Hilir, dan Asisten Wedana Losari Lor.

Desentralisasi

Awal abad XX Wilayah Administratif Kabupaten Cirebon berdasarkan Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 310 tahun 1900 terbagi menjadi tujuh distrik yaitu: Beber, Mandirancan, Sindanglaut, Losari, Plumbon, Palimanan, dan Gegesik Lor. Serta terdiri dari 18 wilayah Onderdistrik.

Dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda saat itu, terdapat daerah-daerah yang bebas berdiri sendiri, oleh karena diberi wewenang otonomi, maka dijadikan kesatuan masyarakat hukum yang berdiri sendiri. Hal ini dapat terjadi karena didukung oleh berbagai peraturan perundangan tentang desentralisasi yaitu: Undang-undang tentang desentralisasi tahun 1903, Surat keputusan tentang desentralisasi tahun 1904 (Decentralisatie Besluit), Ordonansi dewan-dewan lokal tahun 1905 (Locale Raden Ordonnantie), serta Undang-undang tentang perubahan pemerintahan tahun 1922 (Bestuur Hervormings Wet) (Hudojo 1998)

Dalam Pembagian Administratif Pemerintahan, daerah yang luas ini dibagi-bagi dalam beberapa tingkatan hierarkhis, yang dibedakan antara Jawa/ Madura dengan di luar Jawa/Madura. Di daerah Jawa/Madura hierarki pemerintahan daerah yang paling tinggi adalah *Propinsi-Propinsi*, masing-masing dipimpin oleh seorang *Gubernur*. Tiap-tiap propinsi dibagi lagi dalam wilayah-wilayah *Keresidenan* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Residen*. Tiap-tiap Keresidenan dibagi lagi menjadi *Afdeeling-Afdeeling* yang masing-masing dikepalai oleh *Asisten Residen*. Diwilayah *Afdeeling*, diangkat pula seorang *Regent* atau *Bupati* yang mengepalai wilayah *Regenschap* atau *Kabupaten*.

Tiap-tiap Kabupaten dibagi lagi dalam beberapa *District* atau *Kawedanan* di bawah pimpinan seorang *Wedana*. Tiap-tiap District dibagi lagi dalam *Onder District* (sekarang setingkat Kecamatan) dikepalai oleh *Asisten Wedana* (setingkat Camat). Tingkat yang paling akhir adalah Desa merupakan bagian dari *Onder district* dipimpin seorang *Kepala Desa* atau di Cirebon disebut *Kuwu*. Jabatan Gubernur, Residen, Asisten Residen, Kontrolir harus dijabat oleh orang Belanda, sedang jabatan lainnya dipegang oleh orang pribumi.

Regenschap atau Kabupaten adalah daerah otonom yang mengurus kepentingan masyarakat pribumi yang dipimpin oleh Bupati. Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, ia merangkap ketua Dewan Kabupaten dan anggota College van Gecommitteerden. Bupati bertugas melaksanakan verordeningen Kabupaten maupun tingkat pusat. Ia wajib mematuhi perintah-perintah umum, perintah pejabat Propinsi dan Karesidenan serta Asisten Residen. Pendapatan Kabupaten diperoleh dari: Sumbangan dari kas negeri, hasil-hasil pajak, pendapatan milik Kabupaten, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, tambahan pajak verponding, pendapatan negara dan perorangan.

Bupati dibantu oleh Dewan Kabupaten, dan College van Gecommitteerden. Dewan Kabupaten adalah badan perwakilan yang terdiri dari golongan masyarakat, pedagang pribumi, intelektual dan tetua masyarakat. Wewenang dan tugas Dewan Kabupaten yaitu mengurus dan mengatur rumah tangga Kabupaten yang mempunyai keuangan sendiri, menetapkan anggaran Kabupaten dan membuat verordening, melaksanakan verordening umum atau propinsi, dan mengatur susunan Pemerintah Desa. Dewan Kabupaten Cirebon mayoritas terdiri dari bangsa pribumi yaitu 24 orang bangsa pribumi dari 33 orang anggota Dewan Kabupaten Cirebon. Kondisi pemerintahan tersebut diatas berlangsung sampai akhir kapitulasi pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintah pendudukan Jepang (8 Maret 1942). Sedangkan College van Gecommitteerden, badan ini melaksanakan pemerintahan sehari-hari, mengangkat pegawai Kabupaten, menyiapkan segala sesuatu dengan mendapat persetujuan Dewan Kabupaten. Badan ini bertanggung jawab kepada Dewan Kabupaten (Koswara 2000).

Gemeente atau Kotapraja adalah daerah otonom untuk banga kulit putih yang tinggal di perkotaan, mengurus kepentingan masyarakat Belanda dan Eropa. Pada hakikatnya Gemeente atau Kotapraja dan Kabupaten adalah kesatuan masyarakat hukum yang tingkatannya sama, pendapatan daerah, hak dan kewajibannya sama. Hanya saja kepala Kotapraja/Walikota atau *Burgermeester* harus dijabat oleh warga Belanda bukan orang pribumi. Pada saat Propinsi Jawa Barat terbentuk pada tanggal 1 Januari 1926 (Staatsblad 1930/438) diundangkan dalam Staatsblad No. 378 tahun 1925, Kabupaten Cirebon merupakan bagian wilayah Propinsi Jawa Barat (Staatsblad 1925 No. 393) (Koswara 2000).

Terkait pelaksanaan Desentralisasi Pemerintahan di wilayah Cirebon Timur, memasuki awal Abad XX terjadi reorganisasi wilayah Distrik Sindanglaut, selama tahun 1900-1904 di Distrik Sindanglaut (66) yang awalnya meliputi Asisten Wedana Lemahabang, Pengarengan, dan Asisten Wedana Karangwareng berubah menjadi Asisten Wedana Lemahabang, Karangsembung, dan Asisten Wedana Mundu Pesisir. Tahun 1905 nomor Distrik Sindanglaut yang awalnya bernomor 66 menjadi 67, dan Distrik Losari bernomor 53 (Wedana Ciledug Wetan) sampai tahun 1908. Tahun 1908 Distrik Losari berganti nomor urut menjadi 50 yang awalnya Wedana Ciledug Wetan berpindah ke Wedana Ciledug Kulon.

Tahun 1922-1925 Distrik Losari (Wedana Ciledug Kulon) yang awalnya membawahi Asisten Wedana Ciledug, Waled Pacinan, Gebang Hilir, dan Asisten Wedana Losari Lor, menjelang pembentukan Provincie West Java (Provinsi Jawa Barat) pada tahun 1926 berubah menjadi Asisten Wedana Ciledug, Waled, Babakan, dan Asisten Wedana Losari. Pada tahun yang sama wilayah Distrik Sindanglaut (Wedana Lemahabang) yang awalnya membawahi wilayah Asisten Wedana Lemahabang, Karangsembung, dan Asisten Wedana Mundu Pesisir, wilayahnya berubah menjadi Asisten wedana Lemahabang, Karangsembung, dan Asisten Wedana Astanajapura (Asteja 2013). Kondisi wilayah tersebut berlangsung sampai akhir pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan menjelang datangnya Balatentara pendudukan Jepang tahun 1942.

Perdagangan dan Industri Gula Cirebon.

Penanaman pohon Tebu sebagai bahan baku pembuatan gula mempergunakan teknologi tradisional China sudah ada sejak zaman *VOC* atau *Kumpeni Belanda* di wilayah Cirebon, seperti juga terdapat di Bataviasche Ommelanden (sekitar Batavia). *Kumpeni* mengharuskan untuk menyetorkan gula dan mematok 3½ - 4 rxd sebagai harga untuk gula kualitas klas satu, dan 3 rxd untuk kualitas klas dua. Pada saat gagal panen dan wabah yang sangat besar pada tahun 1774 - 1779, *Kumpeni* tidak menuntut hasil gula. Dengan sangat teliti semua produk yang berasal dari Cirebon harus ditandai dengan huruf C.C. dan monogram Kompeni. C.C. singkatan dari Cheribon Cabessa, Cabessa dalam bahasa Portugis yang artinya *Pemimpin*, dengan demikian maka C.C. berarti gula Cirebon kualitas No. 1.

Residen Cirebon sangat berminat pada usaha penggilingan tebu. Ada yang menjadi pemilik, ada yang menjadi kongsi dari pemilik aslinya. Residen saat itu mempunyai penghasilan 36.879 rxd atau sekitar f92.000,- per tahunnya. Disamping itu, Residen meminjamkan uang dengan bunga kepada para pedagang dan mendapatkan juga penghasilan dari perdagangan gula pada saat penyerahan gula kepada rumah-rumah dagang di Batavia (Jakarta), tetapi harus dijaga sesuai dengan ketentuan tertulis dari pemerintah: “berlaku manis dengan nama baik Yang Mulia”. Ini berlaku menjelang tahun 1800 ketika monopoli dan *Kumpeni* telah tamat riwayatnya.

Situasi politik di Eropa menyebabkan sedikit atau tidak sama sekali kapal-kapal Belanda yang berlayar disini. Persediaan gula Residen menumpuk, maka Residen memohon kepada Pemerintah Pusat agar mengizinkan orang-orang Amerika dan Denmark yang dapat dipercaya untuk datang kemari untuk mencicipi rasa manis gula. Gula memberikan juga keuntungan pada saat diekspor, para penyewa mendapatkan 30 stuivers untuk setiap pikulnya.

Ketika San Domingo pada tahun 1802 dihancurkan oleh pemberontakan para budak belian dan orang pengarang gula, maka harga gula saat itu melonjak dengan derastis. Pada tahun 1803 terdapat dua penggilingan gula di Cirebon dan dua buah di daerah Gebang.

Pada saat itu terlihat dengan jelas bahwa ada kecenderungan untuk menarik produk gula khususnya ke Batavia dan sekitarnya. Untuk keperluan ini maka dikumpulkan manusia dan kerbau di daerah Cirebon. Selanjutnya pada pemberontakan pada tahun 1805/6 seluruh penggilingan tebu telah dimusnahkan, tetapi Daendels ingin membangunnya kembali dan membentuk komite untuk penanaman tebu pada tahun 1808 dan sekaligus menargetkan sejumlah angka yang tidak mungkin tercapai yaitu 7700 orang. Daendels hanya mendapatkan 1700 orang dengan upah sebesar 5 rxd perbulannya, tetapi hasilnya nihil. Pada tahun 1817 belum ada penggilingan tebu. Pada tahun 1824 hanya ada beberapa buah, Cigobang pada tahun 1826 lebih maju. Angka ekspor meningkat dari tahun 1828 sampai tahun 1832 dari 4.500 pikul sampai hampir 15.000 pikul. Pihak pemerintah pada tahun 1834 telah menanam tebu sekitar 1500 bau, sedangkan pihak swasta 462 bau (Arsip Nasional republik Indonesia 1976).

Pabrik-pabrik yang mempunyai kontrak dengan pemerintah telah memanen keuntungan besar selama 30 tahun karena tingginya harga gula dipasaran. Tetapi pada sisi lain kurang menyenangkan, dalam laporannya pada tahun 1834 Gubernur Jenderal ad interim Baud melaporkan bahwa dalam perjalanan inspeksinya melihat sesuatu hal yang tidak baik, yaitu para pribumi yang harus menyetorkan tebu ke pabrik dengan gerobak kerbau miliknya hanya mendapatkan upah 50 sen untuk 5-6 kali angkutan, hanya cukup untuk membuat satu pikul gula saja. Dengan melalui berbagai kendala, Baud membuat peraturan yang lebih baik.

Pada tahun 1836 produksi gula ditaksir mencapai 38.000 pikul, dimana 12.000 pikul telah mengalir ke pemerintah setelah harga tebu, kayu bakar, dan uang muka dibayar tidak ada usaha untuk meningkatkan produksi gula, karena dikhawatirkan akan mengganggu penanaman kopi dan indigo (nila). Sementara itu, mereka mulai memikirkan untuk cara penanaman yang lebih baik, mencontoh cara penanaman di Jawa Timur dengan memperbaiki sistem pengairan di Cirebon.

Rakyat sangat menikmati hasil produksinya, pada tahun 1839 mereka telah menerima f. 1.400.000,-. Pada tahun itu juga telah didirikan sebuah tugu peringatan yang sangat menarik perhatian sebagai peringatan penanaman tebu di desa Cikeleng dekat Cilimus dimulai pada 1 Rajab Tahun Dal dengan Candrasengkala Jawa menunjukan tahun 1768 atau 1839 tahun Masehi, merupakan suatu peristiwa yang sangat menggembirakan. Penghasilan gula di Karesidenan Cirebon meningkat sebesar 50.000 pikul, diantaranya 38.000 pikul dibeli oleh pemerintah (Zuhdi 1996).

Dengan pembelian mesin-mesin yang lebih baik menyebabkan lebih banyak lagi mengucurnya dana pinjaman dari pemerintah. Dari pada memakai metode penanaman cara China, maka sejak tahun 1838 dipergunakan metode penanaman cara Pasuruan. Diantara para penanda tangan kontrak pada tahun 1840 terdapat seorang yang bernama Consalves yang sangat terkenal pada kultur tebu, karena telah membuat tebu Cirebon yang berwarna kehitam-hitaman menjadi terkenal keseluruh dunia pada tahun 1850.

Pada saat tahun 1851 telah didirikan dan di aktipkan tiga buah mesin masak dengan stoomkooktoestellen (dengan sistem stoom). Produksi menjadi meningkat, tetapi yang menjadi masalah adalah pemakaian kayu bakar yang meningkat. Mesin pertama pabrik gula Sindanglaut, yang dimiliki oleh seorang Jawa yang bernama Mas Salim, merupakan suatu kesuksesan besar seorang pribumi. Rakyat mendapatkan penghasilan yang sangat baik di bidang industri gula. Mereka berproduksi tiga kali lebih besar dari pada seorang petani perkebunan nila (indigo).

Pada tahun 1865 Cirebon telah menyalurkan lebih dari 200.000 pikul gula dan kultur ini berkembang terus sampai tahun 1882, yang membawa petaka ketika merebaknya penyakit sereh, beban yang luar biasa beratnya untuk para pengusaha pabrik gula adalah pembayaran kepada para petani tebu, yang menyebabkan Cirebon sengat menderita sampai saat modern, ialah alat pembayaran untuk ongkos gerobak yang menggunakan uang tembaga.

SIMPULAN

Wilayah Cirebon mengalami fragmentasi politik pasca-kerajaan Pakungwati, lalu dikonsolidasi secara administratif di bawah pemerintahan kolonial Belanda melalui sistem karesidenan, kabupaten, dan distrik. Wilayah Cirebon Timur (Distrik Sindanglaut dan Losari) berkembang sebagai entitas administratif penting di perbatasan. Perubahan batas, pemekaran, dan reorganisasi distrik serta onderdistrik menunjukkan dinamika pengelolaan wilayah yang intensif, terutama sejak awal abad XX dengan penerapan kebijakan desentralisasi.

Industri gula menjadi tulang punggung ekonomi Cirebon masa kolonial, dengan produksi dan ekspor yang signifikan, meskipun diwarnai eksploitasi tenaga kerja dan ketergantungan pada sistem monopoli. Cirebon mempertahankan identitas sebagai wilayah hibrida budaya Sunda-Jawa, sementara struktur pemerintahan kolonial menjadi dasar birokrasi modern yang berlanjut hingga masa kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional republik Indonesia. (1976). *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Asteja, M. (2014). *An Introduction to the Architectural Heritage: Bangunan Cagar Budaya Kota Cirebon*. STTC, Komunitas Pusaka Cirebon Kendi, Cirebon: Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon.
- Asteja, M. (2013). Vergadering Hal Adat Cheribon 1915 Perubahan Tatahan Adat Masyarakat di Kabupaten Cirebon Masa Kolonial. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 2(2), 211-227.
- Atja. (1986). *Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Danasasmita, S. (1983). *Sejarah Bogor*. Bogor: Pemda Kotamadya DT II Bogor.
- Dasuki, H. A. (1978). *Purwaka Caruban Nagari*. Indramayu: Sudiam.
- Heukeun, A. (1999). *Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta. Jilid I*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.

- Hudojo, W. (1998). *Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940. Penerbitan Naskah Sumber*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Koswara, U. H. (2000). *Sejarah Pemerintahan Keresidenan Cirebon*. Cirebon: Kantor Residen/Pembantu Gubernur Jawa Barat Wilayah III Cirebon.
- Molsbergen, E. C. Godee. (1931). *Uits Cheribon's Geschiedenis, Gedengboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. NIX Co. Bandung 1931. (Terjemahan: dr. Iwan Satibi, 2009)*. Translated by Iwan Satibi. Bandung: NIX Co. Bandung.
- (1884). *Regerings-Almanak Voor Nederlandsch-Indie. Eerste Gedeelte: Grondgebied En Bevolking, Inrichting Van Het Bestuur Van Nederlandsch-Indie En Bijlagen*. Batavia: Landsdrukkerij Weltevreden – Batavia.
- (1857). *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Sulendraningrat, P. S. (1972). *Purwaka Tjaruban Nagari*. Jakarta: Bhratara.
- Tjandrasasmita, Uka. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Zuhdi, S. (1996). *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Edited by Susanto Zuhdi. Jakarta: CV. Devit Prima Karya.